

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan menjadi salah satu faktor penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, sumber daya manusia yang berkualitas tidak akan lepas dari pendidikan yang berkualitas pula. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan menjadi suatu keharusan bagi setiap lembaga pendidikan yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Mutu pendidikan yang baik akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menjadikan sekolah unggul atau bermutu setidaknya ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan kualitasnya, yaitu Sumber daya manusia, metode atau model pendidikan yang diterapkan, menjadikan peserta pendidik sebagai amanah yang harus dididik dan dibina dengan baik, mengevaluasi setiap program dan memperbaiki setiap kekurangan yang ada berdasarkan hasil evaluasi dan mempertahankan serta mengembangkan yang telah baik. Hal tersebut menjadi tanggung jawab setiap individu maupun instansi.

Sumber daya pengelola pendidikan bukan hanya guru atau kepala sekolah, melainkan semua sumber daya yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan suatu satuan pendidikan. Rendahnya mutu SDM pengelola

pendidikan tentu dapat menghambat keberlangsungan proses pendidikan yang bermutu sehingga adaptasi dan sinkronisasi terhadap berbagai program peningkatan mutu pendidikan juga akan berjalan lambat.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia pemerintah telah menetapkan Undang-undang Sistem Pendidikan. Undang-undang tersebut memuat dua puluh dua bab, tujuh puluh pasal, dan penjelasannya. Undang-undang Sistem Pendidikan menjelaskan bahwa setiap pembaruan sistem pendidikan nasional untuk memperbarui kembali visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional di antaranya adalah (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, (3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, (5) memperdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19, Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria yang ditetapkan pemerintah tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pendidikan sebagai salah satu upaya mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang guru dan dosen, undang-undang ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan guru dan dosen, agar mampu berkembang dan sesuai dengan tuntutan era sekarang. Artinya sekolah yang berkualitas harus ditunjang pula oleh guru yang berkualitas.

Dalam kaitannya dengan regulasi pengelola pendidikan, maka yang dilakukan oleh pemerintah saat ini mengacu pada UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005 tentang SNP yang dalam pasal 49 tentang Standar Pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah menerapkan pola Manajemen Berbasis Sekolah, sedangkan untuk satuan pendidikan tinggi menerapkan pola otonomi perguruan tinggi. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan diantaranya satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang: kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus; kalender

pendidikan/akademik; struktur organisasi; pembagian tugas diantara pendidik; pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; peraturan akademik; tata tertib satuan pendidikan; kode etik hubungan; dan biaya operasional pendidikan (Rivai dan Murni, 2009: 34).

Peningkatan mutu sekolah adalah suatu proses yang sistematis yang terus menerus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar menjadi target sekolah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien (Zamroni, 2007: 2). Artinya dalam peningkatan mutu pendidikan harus secara menyeluruh pada setiap komponen dalam pendidikan tanpa terkecuali.

Menurut Suti (2011: 1) solusi terbaik dalam mengembangkan kualitas pendidikan di era otonomi daerah dan otonomi pendidikan melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen, yaitu: tata pemerintahan yang baik, internal dan efisiensi eksternal pendidikan. Melalui penerapan tiga pendekatan diharapkan dapat: (1) pengembangan kapasitas lembaga dan semua program di bidang pendidikan dapat dilaksanakan, (2) pengembangan kualitas pendidikan melalui input, proses, dan output berdasarkan pada otonomi daerah, (3) manfaat dan dampak hasil pengembangan pendidikan dasar terhadap otonomi daerah.

Baik dan tidaknya mutu suatu pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu faktor tujuan dari pendidikan yang dilakukan, faktor kualitas guru atau pendidik, faktor siswa, faktor sarana prasarana, maupun faktor

lingkungan masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh dukungan dan dorongan dari pihak yang pemangku keputusan seperti pemerintah, dinas terkait maupun intansi-intansi pendukung lainnya.

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. *Pertama* strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input oriented*. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan *output* (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. Ternyata strategi *input-output* yang diperkenalkan oleh teori *education production function* (hanushek, 1979, 1981) tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri. *Kedua*, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah), atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat (Rivai dan Murni, 2009: 105).

Melihat berbagai faktor diatas masih banyak sekolah yang jauh dari standar mutu yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kemampuan kepala sekolah dan guru yang belum optimal dalam melakukan tugasnya mengelola berbagai sumber daya yang ada di sekolahnya masing-masing.

Ada berbagai cara yang bisa dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, misalkan dengan menggunakan pendekatan perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*), menentukan standar mutu (*quality assurance*), perubahan kultur (*change of culture*), perubahan organisasi (*upsidedown organization*), mempertahankan hubungan dengan pelanggan (*keeping close to the costumer*). Cara-cara tersebut tujuannya sama yaitu perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Menurut Kristianty (2005: 107) agar lembaga pendidikan berkualitas lembaga harus mampu, ciptakan tujuan yang mantap demi perbaikan produk dan jasa sekolah memerlukan adanya tujuan akhir yang mampu mengarahkan siswa menghadapi masa depan secara mantap. jangan membuat siswa sekedar memiliki nilai bagus tetapi juga harus mampu membuat siswa memiliki kemauan belajar seumur hidup. Siswa berhak mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Dengan kata lain, mereka tidak lagi sebagai siswa yang pasif dan rela diperlakukan seburuk apapun tanpa dapat berkomentar.

Misalkan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) untuk peningkatan mutu pendidikan. MBS dipandang sebagai alternatif dari pola umum pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan daerah. MBS adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah. Dengan demikian, MBS pada dasarnya merupakan sistem manajemen dimana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBS memberikan kesempatan pengendalian lebih besar kepada kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka (Rivai dan Murni, 2009: 140).

Oleh karena itu sekolah terutama sekolah swasta dengan adanya kebijakan tersebut harus mampu memaksimalkan dan mengoptimalkan penerapannya agar mampu menjadi sekolah yang bermutu. Hubungan kerjasama yang baik antara setiap komponen pengendali pendidikan yang ada harus dijadikan sebagai faktor keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Salah satu lembaga yang menjadi perhatian peneliti adalah SD Muhammadiyah 8 Jagalan Kota Surakarta, beberapa tahun terakhir tingkat perhatian dan minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putri mereka semakin meningkat terhadap sekolah ini. Hal tersebut dapat dilihat beberapa tahun terakhir SD Muhammadiyah dapat menampung peserta didik sampai 3

kelas tiap angkatan, padahal lima atau enam tahun yang lalu tiap angkatan hanya satu kelas. Sehingga menuntut sekolah itu untuk lebih berkembang dan maju baik dari segi sarana fisik maupun peningkatan kualitas pendidikannya atau pembelajarannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang diformulasikan dalam sebuah judul penelitian **“Model Peningkatan Mutu Pendidikan Di SD Muhammadiyah 8 Jagalan Surakarta”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah terkait model peningkatan mutu pendidikan. Peneliti berkeyakinan bahwa mutu pendidikan dapat dipengaruhi oleh upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru dalam mengimplementasikan manajemen strategik yang telah dirumuskan, adapun rincian sub fokusnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana layanan sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah 8 Jagalan Surakarta?
2. Bagaimana budaya sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah 8 Jagalan Surakarta?
3. Bagaimana strategi pembelajaran dalam peningkatkan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah 8 Jagalan Surakarta?



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan layanan sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah 8 Jagalan Surakarta.
2. Untuk mendeskripsikan budaya sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah 8 Jagalan Surakarta.
3. Untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah 8 Jagalan Surakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a) Manfaat Teoritis**

- 1) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan khususnya bidang pendidikan.
- 2) Sebagai tambahan khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan.
- 3) Pembuatan kebijakan berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

#### **b) Manfaat Praktis**

- 1) Dapat dijadikan rujukan bagi para penyelenggara pendidikan khususnya SD, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
- 2) Merupakan tambahan referensi bagi peneliti dan mereka yang memiliki perhatian terhadap peningkatan mutu pendidikan, sehingga memungkinkan adanya penelitian-penelitian lanjutan yang lebih baik.